

DAFTAR ISI

	D. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja	170
	A. Mengapa Reformasi Perencanaan dan Anggaran Berbasis Kinerja (Disiplin)	172
	1. Anggaran Berbasis Kinerja (Disiplin)	174
	2. Allocated Efficiency (Efisiensi Alokasi)	175
	3. Operational Efficiency (Efisiensi Operasional)	176
	B. Pendekatan Perencanaan	177
	1. Perencanaan Terpadu	178
	2. Rencana Peneluaran Jangka Menengah	179
	PRAKATA	v
	DAFTAR ISI	ix
	DAFTAR TABEL	xiii
	DAFTAR GAMBAR	xv
	BAB 1 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	1
	A. Konsep Perencanaan	1
	1. Pengertian Perencanaan	1
	2. Perencanaan Pembangunan	4
	3. Pendekatan Perencanaan Pembangunan	9
	4. Jenis Perencanaan	21
	5. Manfaat Perencanaan	22
	B. Teori Perencanaan	24
	1. Perencanaan Rasional Komprehensif	24
	2. Perencanaan Inkremental	28
	3. Perencanaan Advokasi	29
	4. Perencanaan Radikal	34
	5. Perencanaan Transaktif	37
	C. Konsep Penganggaran	38
	D. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran	46

BAB 2 SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	53
A. Alur Perencanaan dan Penganggaran	53
B. Perencanaan Penganggaran dan Manajemen Berbasis Kinerja	64
1. APBD dan Hak atas Pelayanan Publik	65
2. Anggaran dan Pelayanan Publik	71
C. Siklus Anggaran Daerah	75
BAB 3 REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	81
A. Mengapa Reformasi Perencanaan dan Penganggaran?	81
1. <i>Aggregate Fiscal Discipline</i> (Disiplin Fiskal Agregat)	91
2. <i>Allocative Efficiency</i> (Efisiensi Alokasi)	92
3. <i>Operational Efficiency</i> (Operasional Efisiensi)	95
B. Pendekatan Penganggaran	96
1. Penganggaran Terpadu	96
2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah	98
3. Penganggaran Berbasis Kinerja	105
C. Komponen Perencanaan dan Penganggaran	106
BAB 4 AKUNTABILITAS DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN	109
A. Konsep Akuntabilitas	109
B. Mengapa Akuntabilitas?	114
C. Akuntabilitas Kinerja	119
D. Akuntabilitas Keuangan dan Anggaran	121
1. Keuangan Negara	121
2. Reformasi dalam Tata Kelola Keuangan Negara	123
3. Akuntabilitas Keuangan dan Tata Kelola Anggaran	125
4. Pengertian Akuntabilitas Keuangan	130
5. Laporan Keuangan	131
6. Laporan Keuangan Pemerintah	133

7. Standar Akuntansi Pemerintahan	134
8. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual	135
BAB 5 ANGGARAN BERBASIS KINERJA	145
A. Anggaran, Pengertian dan Fungsinya	146
B. Mengapa Anggaran Berbasis Kinerja?	150
C. Penganggaran Berbasis Kinerja	155
1. Konsepsi Anggaran Berbasis Kinerja	155
2. Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja	164
D. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja	170
1. Faktor Kunci Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	172
2. Anggaran Berbasis Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	174
BAB 6 MODEL IMPLEMENTASI PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG BERKEADILAN	175
A. Anggaran yang Berpihak pada Kaum Miskin (<i>Pro Poor Budgeting</i>)	176
1. Kemiskinan Sebagai Isu Global	176
2. Kerangka Konseptual <i>Pro Poor Budgeting</i>	181
3. Aspek Pengelolaan <i>Pro Poor Budgeting</i>	185
B. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	189
1. Konsepsi Gender	189
2. Model Analisis Gender	194
3. Gender Budget Statement (GBS)	210
4. Isu Gender dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran Daerah	212

145	C. Perencanaan Penganggaran Responsif Anak (PPRA)	220
135	1. Perencanaan Penganggaran dan Pemenuhan Hak Anak	220
145	2. Analisis Anggaran Responsif Anak	227
146	DAFTAR PUSTAKA	233
146	BIODATA PENULIS	241
152	1. Konsep Anggaran Berbasis Kinerja	75
152	2. Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja	75
170	D. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja	18
172	1. Faktor Kunci Keberhasilan Anggaran Berbasis Kinerja	18
174	2. Anggaran Berbasis Kinerja sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19
174	3. <i>All-Of-A (Efficiency) (All-Of-A)</i>	92
175	4. <i>Operational Efficiency (Operational Efficiency)</i>	95
176	B. Pendekatan YANG BERKADILAN	96
176	1. Anggaran yang Berpikir pada Kasus Miskin (Pro Poor Budgeting)	96
176	2. Kemiskinan sebagai isu Global	98
181	3. Kerangka Konseptual Pro Poor Budgeting	101
181	4. Aspek Pengelolaan Pro Poor Budgeting	101
189	B. PERENCANAAN PENGANGGARAN	101
189	1. Konsep Akuntabilitas Gender Responsif (PPRG)	101
189	2. Konsep Gender	114
194	3. Akuntabilitas Kinerja Gender	119
210	4. Model Analisis Gender	121
210	5. Akuntabilitas Anggaran Gender Budget Statement (GBS)	121
212	6. Isu Gender dalam Dokumen Perencanaan Reformasi Tata Kelola Keuangan Negara	123
212	7. Akuntabilitas Keuangan dan Tata Kelola Anggaran	125
	8. Pengertian Akuntabilitas Keuangan	130
	9. Laporan Keuangan	131
	10. Laporan Keuangan Pemerintah	133